



PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS IB

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun **2024**



menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diberlakukan efektif.

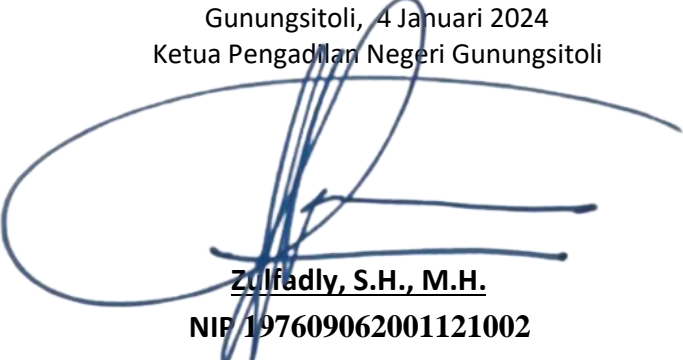
Laporan tahunan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2024 ini merupakan laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B dalam satu tahun terakhir. Laporan Tahunan ini merupakan salah satu bentuk penyajian Informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Gunungsitoli kepada publik atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama.

Pada awal tahun 2023 lalu, Pengadilan Negeri Gunungsitoli berhasil meraih prestasi gemilang yakni Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dengan Nilai Akreditasi "A" (Excellent) yang berlaku selama 1 (satu) tahun atau 1 (satu) periode . Hal ini merupakan hal yang sangat membanggakan namun juga sekaligus sebagai cambukan bagi Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar dapat terus melaksanakan pelayanan publik dan kinerjanya dimasa yang akan datang, sesuai dengan motto Pengadilan Negeri Gunungsitoli : "SOKHI" yang berasal dari bahasa daerah Nias. Secara terminologi "SOKHI" memiliki arti "BAGUS", bagi Pengadilan Negeri Gunungsitoli sendiri "SOKHI" merupakan akronim dari ; "Santun **O**bjektif **K**redibel **H**armonis **I**novatif".

Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3111/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 2022 dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.137/KPN/SK/KP.04.10/12/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2022.

Demikian Laporan Tahunan kegiatan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2024, kami sampaikan semoga dengan adanya laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk lebih terpacu menjadi lebih optimal dalam melaksanakan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di bidang hukum pada tahun 2023, sehingga dapat terwujud tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Kepulauan Nias khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Gunungsitoli, 4 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli



Zulfadly, S.H., M.H.
NIP 197609062001121002

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Bab I Pendahuluan	1
A. Kebijakan Umum Peradilan	1
B. Visi dan Misi	3
C. Kebijakan Mutu Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B	4
D. Budaya Kerja	5
E. Motto.....	6
F. Rencana Strategis (RENSTRA)	6
Bab II Keadaan Perkara di Peradilan umum	8
A. Keadaan Perkara di Peradilan umum	8
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	8
2. Keadaan Perkara Tingkat banding.....	8
3. Keadaan Perkara tingkat Kasasi	9
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	9
B. Penyelesaian Perkara	9
1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus	10
2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	10
3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi.....	11
dan peninjauan kembalij	
4. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	12
5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi.....	12
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)	13
1. Posbakum (Pos Bantuan Hukum).....	13
2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu	14
3. Perkara Prodeo (pembebasan Biaya Perkara)	15
Bab III Sumber Daya Manusia	16
A. Mutasi.....	19
B. Promosi.....	19
C. Pensiun	19
D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	20
E. Surat Keputusan	21
Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	32
A. Pengelolaan Keuangan	32
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	34
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	36

	1. Implementasi E-Court di Lingkungan Peradilan Umum	36
	2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum.....	38
Bab V	Peningkatan Pelayanan Publik.....	39
	A. Akreditasi Penjaminan Mutu.....	39
	B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	47
	C. Inovasi Pelayanan Publik.....	47
Bab VI	Pengawasan.....	52
	A. Internal.....	52
	B. Evaluasi	53
Bab VII	Penutup	56
	A. Kesimpulan.....	56
	B. Rekomendasi	56
LAMPIRAN		
	A. SK Pembentukan Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024	
	B. Laporan Keadaan Perkara Pidana Tahun 2024	
	C. Laporan Keadaan Perkara Perdata Tahun 2024	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Keadaan Perkara di Tingkat Pertama	8
Tabel 2. Keadaan Perkara di Tingkat Banding	8
Tabel 3. Keadaan Perkara di Tingkat Kasasi	9
Tabel 4. Keadaan Perkara di Tingkat Peninjauan Kembali	9
Tabel 5. Jumlah Perkara Pidana yang Putus Tahun 2024.....	10
Tabel 6. Jumlah Perkara Perdata yang Putus tahun 2024.....	10
Tabel 7. Jumlah Perkara Pidana yang Putus Tepat Waktu	10
Tabel 8. Jumlah Perkara Pidana yang Putus Tepat Waktu	10
Tabel 9. Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	11
Tabel 10. Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	12
Tabel 11. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Mediasi.....	12
Tabel 12 Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Diversi.....	13
Tabel 13. Penyerapan Anggaran POSBAKUM di PN Gunungsitoli	14
Tabel 14. Penyerapan Anggaran Sidang Keliling di PN Gunungsitoli	15
Tabel 15. Penyerapan Anggaran Perkara Prodeo di PN Gunungsitoli	16
Tabel 16. Profil SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli	17
Tabel 17. Data Mutasi Aparatur PN Gunungsitoli.....	17
Tabel 18. Data Promosi Aparatur PN Gunungsitoli.....	18
Tabel 19. Data Pensiun Aparatur PN Gunungsitoli	18
Tabel 20. Data Diklat Aparatur PN Gunungsitoli	18
Tabel 21. Realisasi Anggaran DIPA-005.01.2.098696 Tahun 2024	32
Tabel 22. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024	32
Tabel 23. Realisasi Belanja Barang Tahun 2024	32
Tabel 24. Realisasi Belanja Modal Tahun 2024	32
Tabel 25. Realisasi Anggaran DIPA-005.03.2.099198 Tahun 2024	33
Tabel 26. Pengadaan Tahun 2024.....	33
Tabel 27. Pemeliharaan Tahun 2024	33
Tabel 28. Penghapusan Tahun 2024.....	33
Tabel 29. Keadaan Kendaraan Dinas Tahun 2024	34
Tabel 30. Keadaan Rumah Dinas Tahun 2024	35
Tabel 31. Rata-rata Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Periode November 2024	44
Tabel 32. Data Hakim Pengawas Bidang dan Pengamat.....	52
Tabel 33. Rekapitulasi Pengaduan di PN Gunungsitoli Tahun 2024	53



BAB I

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri Gunungsitoli merupakan salah satu Badan Peradilan Tingkat Pertama yang memiliki tugas pokok yakni memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata. Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai pengadilan tingkat pertama memiliki tugas untuk melaksanakan tugas non kedinasan yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan. Untuk itu Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Selain itu Pengadilan Negeri Gunungsitoli harus memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan proses persidangan, penjatuhan putusan dan penentuan biaya perkara serta menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Penyusunan laporan tahunan ini dilakukan dengan menginventarisir lebih dahulu kondisi kantor yang ada, baik itu personil maupun keadaan administrasi serta kondisi gedung dengan menyadari adanya kendala-kendala yang ada, seperti keterbatasan tenaga, ruang, dana dan fasilitas lainnya (sebagai input). Kondisi yang ada tersebut diusahakan untuk membenahi, meningkatkan dan merubah keadaan kantor, personil dan administrasi menjadi lebih bersih, rapi teratur dan tertib.

Perumusan suatu kebijakan umum sangat memerlukan pedoman yang jelas agar setiap kebijakan yang diambil dapat bersinergi dan tepat sasaran. Hal ini bertujuan agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Gunungsitoli selalu mempedomani semua kebijakan yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, termasuk diantaranya Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035.

Beberapa upaya yang telah diuraikan pada Cetak Biru Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035 dalam mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan Indonesia, yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
2. Dukungan pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana prasaranan dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang berkompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
7. Dukungan pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi;
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi yang terpadu;

Selain berpedoman kepada hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B juga berpedoman pada kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dengan membuat program prioritas. Beberapa program prioritas tersebut, yaitu :

1. Program tunggakan minutasi nihil untuk melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang tenggang waktu penyelesaian perkara;
2. Program sistem pelayanan satu pintu (*one stopintergrated service*) atau dikenal dengan istilah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk pelayanan persidangan. Dimana semua pelayanan persidangan dikelola oleh satu pintu yakni bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Program keterbukaan informasi dengan menyajikan berita-berita atau informasi yang informatif dan akurat pada website Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B “www.pn-gunungsitoli.go.id” serta menggalakkan dan membantu pengisian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta pelaksanaan upload putusan ke Direktori Putusan;
4. Program pengembangan sistem pengadilan yang akuntabel dan transparan dengan mengoptimalkan meja pelayanan terpadu serta memperbanyak papan informasi layanan yang ditempatkan disekitar gedung kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli Keals I B;

5. Program sidang keliling terpadu “*one day service*” dalam hal memenuhi hak-hak identitas hukum terutama dalam perbaikan nama bagi masyarakat yang kurang mampu;
6. Program e-SKUM (elektronik Surat Kuasa Untuk Membayar) yaitu aplikasi *web-based* yang dapat membantu para pihak untuk menghitung sendiri panjar biaya perkara;
7. Program *Audio to Text Recording* (ATR) yaitu aplikasi persidangan pengadilan berbasis teknologi untuk merubah suara menjadi teks pada proses persidangan, sehingga semua proses tanya jawab dalam persidangan secara otomatis terekam dalam bentuk teks. Aplikasi ATR ini sudah terintegrasi langsung dengan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
8. Pelaksanaan penyelesaian perkara mediasi serta implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sasaran akhir dalam Laporan Tahunan ini adalah keadaan kantor dan administrasi yang efektif dan efisien dalam memberi pelayanan hukum kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan/kebutuhan yaitu:

- a. Memberi pelayanan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan kepada para pencari keadilan atau anggota masyarakat dan instansi yang membutuhkan.
- b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat di dalam menangani permasalahan yang berkembang di masyarakat.

B. VISI DAN MISI

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli, adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Agung”.

Visi dimaksud bermakna untuk dapat menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu

perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Gunungsitoli menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

C. KEBIJAKAN MUTU PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B.

Untuk mewujudkan Cetak Biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Profesionalisme, Perlakuan yang Sama kepada Seluruh Pencari Keadilan, serta Menjaga Kewibawaan dan Kehormatan Institusi melalui :

1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;
2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
3. Penyelesaian Perkara dengan Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan;
4. Keterbukaan Informasi kepada para Pencari Keadilan.

D. BUDAYA KERJA.

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian tugas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B adalah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan, dimana segenap aparatur peradilan dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut :

1. Adil dan tidak diskriminatif;

2. Cermat;
3. Santun dan ramah;
4. Tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
5. Profesional;
6. Tidak mempersulit;
7. Patuh dan taat kepada perintah atasan yang sah dan wajar;
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas Institusi Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B;
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bersifat terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
14. Sesuai dengan kepantasan;
15. Tidak menyimpang dan menyalahi prosedur yang berlaku.

Berdasarkan itu juga Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah menerapkan 8 (delapan) Budaya Malu dalam bekerja. Adapun budaya malu tersebut adalah :

1. Malu terlambat masuk kantor dan pulang sebelum waktunya serta tidak mengikuti apel;
2. Malu tidak masuk kerja tanpa alasan atau keluar pada saat jam kerja;
3. Malu kerja tanpa terprogram, tidak bertanggungjawab dan terbengkalai;
4. Malu bekerja tidak berprestasi;
5. Malu tidak berperan aktif dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan kantor;
6. Malu tidak berpakaian rapi, tidak bertatakrama dan tidak berpakaian sopan santun;
7. Malu bermain, merokok dan membuat keributan pada saat jam kerja;
8. Malu tidak menjunjung tinggi, tidak menghargai dan tidak menjaga kehormatan korps.

E. MOTTO

Motto Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B adalah “**SOKHI**” yang dalam bahasa daerah Nias berarti “**BAGUS**” dan merupakan akronim dari “**Santun Objektif Kredibel Harmonis Inovatif**”.

F. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai *proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan kekeyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif*.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli perlu dirumuskan agar dapat diketahui secara tepat atas hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli guna tercapai visi dan misinya dalam kurun waktu tersebut dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, selanjutnya untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan strategis, ditetapkanlah indikator kinerja yang terukur.

Tujuan strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

5. Terwujudnya aparat Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang profesional dan akuntabel;
6. Meningkatnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung tugas pokok Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
7. Meningkatnya pengawasan intern dan transparansi peradilan.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli maka dapat secara tepat mengetahui hal-hal yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dan menungkingkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terstruktur, yaitu sesuai yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;
3. Meningkatkan efektifitas penyederhanaan penyelesaian perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin dan terpinggirkan terhadap peradilan (*aces to justice*);
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatnya kualitas pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
7. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
8. Meningkatnya pengelolaan manajerial Pengadilan Negeri Gunungsitoli secara akuntabel, efektif dan efisien.



BAB II

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

B A B II

KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

1. Keadaan Perkara di Tingkat Pertama

Pada tahun 2024 jumlah perkara yang masuk sebanyak 152 Perkara Pidana Biasa, 2 Perkara Pidana Cepat, 10 Perkara Pidana Anak, 6 Pra Peradilan,

Tabel 1.Keadaan Perkara Tingkat Pertama

a. Pidana

No	PERKARA PIDANA	JUMLAH					
		BIASA	PID.SUS - ANAK	SINGKAT	CEPAT	LANTAS	PRA PERADILAN
1	SISA TAHUN 2023	27	0	-	-	-	0
2	MASUK TAHUN 2024	140	12	1	4	3425	6
3	PUTUS TAHUN 2024	143	12	1	4	3425	6
4	SISA TAHUN 2025	24	0	-	0	-	0

b. Perdata

No	PERKARA PERDATA	JUMLAH				
		GUGATAN	GUGATAN SEDERHANA	PERMOHONAN	EKSEKUSI PUTUSAN	BANTAHAN / PERLAWANAN
1	SISA TAHUN 2023	31	2	3	5	0
2	MASUK TAHUN 2024	91	23	166	13	4
3	PUTUS/DILAKSANAKAN	82	20	168	4	0
4	SISA TAHUN 2024	40	5	1	14	4

2. Keadaan Perkara di Tingkat Banding

Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut :

Tabel 2.Keadaan Perkara Tingkat Banding

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara		
		Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah
1	Perkara Pidana	0	24	24
2	Perkara Perdata	2	18	20

3. Keadaan Perkara di Tingkat Kasasi

Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengajukan upaya hukum kasasi sebagai berikut :

Tabel 3.Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara		
		Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah
1	Perkara Pidana	0	12	12
2	Perkara Perdata	5	12	19

4. Keadaan Perkara di tingkat Peninjauan Kembali

Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) sebagai berikut :

Tabel 4.Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara		
		Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah
1	Perkara Pidana	0	2	2
2	Perkara Perdata	3	4	7

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Jumlah perkara pidana biasa, khusus, cepat, singkat , lalu lintas/tilang dan pra peradilan yang putus pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Jumlah Perkara Pidana yang Putus Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara			Jumlah Perkara Putus 2023	Sisa Perkara yang Belum Putus 2023
		Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah		
1	Pidana Biasa	27	140	167	143	24
2	Pidana Khusus	0	12	12	12	0
3	Pidana Cepat	0	4	4	4	0
4	Pidana Singkat	0	1	1	1	0
5	Pidana Lalu Lintas	0	3425	3425	3425	0
6	Pra Peradilan	0	6	6	6	0

Jumlah perkara perdata yang putus pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Jumlah Perkara Perdata yang Putus tahun 2024

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara			Jumlah Perkara Putus 2024	Sisa Perkara yang Belum Putus 2024
		Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah		
1	Perdata Gugatan	31	95	105	82	40
2	Bantahan/Perlawanan	0	4	4	0	4
3	Perdata Gugatan Sederhana	2	23	25	21	4
4	Perdata Permohonan	3	166	169	168	1

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Jumlah perkara Pidana yang diputus tepat waktu adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Jumlah Perkara Pidana yang Putus Tepat Waktu

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara		Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu 2024	Sisa Perkara Putus Tidak Tepat Waktu
		Sisa 2023	Masuk 2024		
1	Pidana Biasa	27	140	84	31
2	Pidana Khusus	0	12	12	0
3	Pidana Cepat	0	4	4	0
4	Pidana Singkat	0	1	1	0

5	Pidana Lalu Lintas	0	3425	3425	0
6	Pra Peradilan	0	6	6	0

Jumlah perkara perdata yang diputus tepat waktu adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Jumlah Perkara Perdata yang Putus Tepat Waktu

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara		Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu 2024	Sisa Perkara Putus Tidak Tepat Waktu
		Sisa 2023	Masuk 2024		
1	Perdata Gugatan	31	95	65	17
2	Perdata Gugatan Sederhana	2	23	21	0
3	Perdata Permohonan	3	166	168	0

3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Jumlah perkara Pidana yang diajukan upaya hukum adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Jumlah Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

NO.	UPAYA HUKUM	SISA THN 2023	MSK THN 2024	JLH	DIKIRIM	SISA TAHUN 2024	KET
1	BANDING	0	24	24	22	2	- Sisa Banding Perkara Pidana Biasa tahun 2024 berjumlah 2 berkas dan telah dikirimkan ke PT MDN pada
2	KASASI	0	12	12	12	0	- 10 Kasasi Perkara Pidana Biasa - 2 Kasasi Perkara Khusus Anak
3	PENINJAUAN KEMBALI	0	2	2	1	1	- Sisa PK Perkara Pidana Biasa tahun 2024 berjumlah 1 berkas yang belum dikirimkan karena masih dalam tahap Pembuatan Berita Acara Pendapat Majelis Hakim.
4	GRASI	0	0	0	0	0	-

Berdasarkan data tersebut maka jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK adalah sisa perkara pidana biasa tahun 2023 ditambah jumlah perkara pidana biasa tahun 2024 dikurangi jumlah berkas yang diajukan upaya hukum pada tahun 2024 kemudian dijumlahkan dengan berkas banding yang dicabut, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK pada Tahun 2024 adalah 159 (serratus lima puluh sembilan) berkas dengan detil sebagai berikut ;

- Jumlah Perkara Sisa Tahun 2023 : 27 Perkara
- Jumlah Perkara Masuk Tahun 2024 : 157 Perkara (+10 PID-SUS.ANAK)
- Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2024 : 36 Perkara
- Mencabut upaya Hukum di Tahun 2024 : Nihil
- Tidak memenuhi syarat formil : 2 Perkara
- Total : 148 Perkara**

Jumlah perkara perdata yang diajukan upaya hukum adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Jumlah Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

NO.	UPAYA HUKUM	SISA THN 2023	MSK THN 2024	JLH	DIKIRIM	KET
1	BANDING	2	18	20	20	-
2	KASASI	5	12	17	17	-
3	PENINJAUAN KEMBALI	3	4	7	7	-

Berdasarkan data tersebut maka jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK adalah sisa perkara perdata gugatan tahun 2023 ditambah jumlah perkara perdata gugatan tahun 2024 dikurangi jumlah berkas yang diajukan upaya hukum pada tahun 2024, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK adalah : 252 (dua ratus lima puluh dua) berkas.

- Jumlah Perkara Sisa Tahun 2023 : 31 Perkara
- Jumlah Perkara Masuk Tahun 2024 : 95 Perkara
- Mengajukan Upaya Hukum : 18 Perkara
- Total : 252Perkara**

4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi

Tabel 11. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Mediasi

No	Sisa Mediasi Tahun Lalu	Perkara Mediasi	Jumlah Perkara yang Dimediasi (2 + 3)	Penyelesaian Mediasi					Mediasi Berjalan (4- (8+9+10))	
				Berhasil				Tidak Berhasil		Tidak Dapat Dilaksanakan
				Akta Perdamaian / Putusan	Berhasil Sebagian	Penetapan Pencabutan	Jumlah (5 + 6 + 7)			
1	1	38	39	1	0	0	1	38	0	0

5. +Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi.

Tabel 12. Jumlah Perkara Pidana yang Berhasil Diversi

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara		Jumlah Perkara yang Berhasil Melalui Diversi
		Sisa 2023	Masuk 2024	
1	Kesepakatan Diversi	0	0	0

Rekapitulasi perkara yakni menggambarkan keadaan perkara pidana dan perdata yang diterima dan diselesaikan selama tahun 2024. Untuk data lebih lanjut terdapat pada lampiran laporan tahunan ini.

C. AKREDITASI PENJAMIN MUTU

1. Posbakum

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh lembaga peradilan dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama dengan tujuan untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advice hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah memiliki Posbakum yang bekerjasama dengan LBH Kepulauan Nias. LBH Kata Nias Hasambua sendiri telah menjalankan tugas dan fungsinya sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan saat ini, berdasarkan Surat Penetapan Pengadaan Langsung Nomor : W2.U12/09/PPK-PL/XII/2020 tentang Penetapan Pengadaan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Beberapa layanan yang diberikan oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 25, yaitu :

- Pemberian informasi, konsultasi atau advis 13hukum;
- Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
- Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum.

Adapun tatacara pengajuan permohonan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2014 Pasal 32 yaitu :

- Pemohon mengisi formulir dan memberikan persyaratan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 22 Ayat (2);

- b. Apabila penerima layanan Posbakum pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara maka petugas posbakum pengadilan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Apabila penerima layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan disidang Pengadilan petugas memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum dan daftar organisasi bantuan hukum.

Anggaran yang tersedia pada DIPA 099198 untuk pelaksanaan POSBAKUM sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). Penyerapan anggaran Posbakum di Pengadilan Negeri Gunungsitoli 100%, rinciannya sebagai berikut :

Tabel 13. Penyerapan Anggaran POSBAKUM di PN Gunungsitoli

PAGU	Jumlah Anggaran Digunakan (Rp)	Sisa Anggaran
36.000.000	36.000.000	0

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Pelaksanaan sidang keliling/pelayanan terpadu pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling. Peraturan ini juga yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling. Pelayanan terpadu sidang keliling merupakan rangkaian yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara pihak terkait. Pelayanan terpadu sidang keliling merupakan bagian dari Pelayanan Publik yang Prima di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan tujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum.

3. Perkara Prodeo

Pelaksanaan persidangan untuk perkara prodeo di Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2024 nihil. Sehingga anggaran DIPA yang telah tersedia penyerapannya 0% dikarenakan tidak ada masyarakat yang mendaftar perkara perdata secara prodeo (bebas biaya).

Adapun anggaran perkara prodeo termasuk pada DIPA 099198 yaitu sebagai berikut:

Tabel 14. Penyerapan Anggaran Perkara Prodeo di PN Gunungsitoli

PAGU	Jumlah Anggaran Digunakan (Rp)	Sisa Anggaran
0	0	0



BAB III

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

B A B III

SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka Pembinaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 5 Tahun 1996 mengenai Struktur dan Tata Organisasi Pengadilan Negeri Sungailiat maka dalam rangka pembinaan personil dan sumber daya manusia Pengadilan Negeri Sungailiat memiliki kewenangan untuk memberikan petunjuk dan arahan untuk meningkatkan profesionalisme kerja.

Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung kepada kualitas, integritas, dan kinerja individu yang bekerja didalamnya, apabila integritas dan kinerja individu yang bekerja diorganisasi tersebut tidak berkualitas dan profesional, maka akan menjadi kendala dalam menjalankan suatu sistem yang berorientasi hasil (result oriented) dan berbasis pada kinerja. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai integritas, dedikasi yang tinggi dan mempunyai komitmen, semangat serta konsistensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena suatu sistem yang berbasis kinerja hanya akan menghasilkan output yang memuaskan apabila sistem tersebut dikendalikan dan dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam rangka mensinergikan program pengembangan SDM yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan suatu Pengadilan yang Unggul (Court Excellence) dan suatu Badan Peradilan Indonesia yang Agung maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli mencoba menuangkan misi dan agenda perubahan dalam bentuk peningkatan kapasitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Gunungsitoli senantiasa meningkatkan kualitas dan profesionalisme bagi Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, maupun seluruh staf.

Aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam melaksanakan pekerjaan tentu diberikan target pekerjaan sesuai dengan Jabatan yang di emban oleh masing-masing aparatur, sehingga adanya keluaran atau capaian kinerja pegawai dapat terukur secara sistematis. Berikut Sasaran Kinerja Pegawai Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2024 ;

Sasaran Kinerja Pegawai Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2024

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Kegiatan Tahun 202	Ket
1.	ZULFADLY, S.H.,M.H	Ketua	5	
2.	DODY RAHMANTO, SH, MH	Wakil Ketua	7	
3	ALFAN PERDANA, S.H.	Hakim	7	
4.	JUNTER SIJABAT, S.H.,MH.	Hakim	7	
5.	HENGKY ALEXANDER YAO, S.H.,M.H.	Hakim	7	
6	GABRIEL LASE, S.H.	Sekretaris	7	
7	LEOTUA HATOGUAN T, S.H.,M.H.	Panitera	15	
8	ERWIN HAREFA, SH	Sekretaris	10	
9	TRISMAN ZANDROTO	Panitera Muda Pidana	9	
10	ANUAR GEA, SH, MH	Panitera Muda Perdata	9	
11	BERLIANNA S.LAIA, S.H	Kasubbag Kepegawain, Organisasi dan Tata Laksana	8	
12	WILPEN F. SIMANUNGKALIT, SH	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	11	
13	ALIUS LASE, SH	PaniteraPengganti	2	
14	IKUTI TELAUMBANUA, SH	Panitera Pengganti	8	
15	RONI SYAHPUTRA WARUWU, SH	Panitera Pengganti	4	
16	YAKUB FRANS SIHOMBING, SH, MH	Panitera Pengganti	4	
17	FENUS J.A. MENDROFA	Jurusita	2	
18	SYAHRIR BUDIMAN	JurusitaPengganti	3	
19	AFFECTION E. GULO, SE	JurusitaPengganti	2	
20	SAHAT W. J. SIMORANGKIR, SE	Penyusun Laporan Keuangan	4	
21	DEYENDI MOLORE MANALU, S.Sos	Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan	7	
22	RAHEL O. SIANIPAR, A.Md.A.B	Arsiparis Terampil	5	
23	MELVI SINAGA, A.Md.A.B	Klerek – Pengelola Penanganan Perkara	9	
24	NIKEN NABABAN, A.Md,Ak	Klerek- Pengelola data dan Infromasi	6	
25	ANI MARTATINA TELAUMBANUA, A.Md	Klerek – Pengelola Penanganan Perkara	5	
26	HAGAINA MONIKA BR TARIGA, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	4	

27	FINOLA BR PASARIBU, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	4	
28	ADNAN BRILIAN ULAPIA, S.H	Analisis Perkara Peradilan	4	

Berikut adalah Profil aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli berdasarkan kepangkatan

Tabel 15. Profil SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli

No.	Jabatan	PANGKAT/GOL. RUANG															
		IV				III				II				I			
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
1	Ketua Pengadilan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wakil Ketua	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Hakim	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Panitera	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Panitera Muda Pidana	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Panitera Muda Perdata	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Panitera Muda Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Panitera Pengganti	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Jurusita	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Jurusita Pengganti	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kasubag Umum dan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Pelaksana	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
JUMLAH		2	2	-	-	6	4	1	9	-	-	2	2	-	-	-	-

A. Mutasi

Tabel 16. Data Mutasi Aparatur PN Gunungsitoli

No	Nama	Jabatan Lama	Hasil Mutasi	Nomor dan Tanggal SK
1	Wijawiyata, S.H.	KPN Gunungsitoli	Hakim PN Jakarta Utara	707/DJU/SK.KP4.1.3/VI/2024 27 Juni 2004
2	Rocky B.F. Sitohang, S.H.,M.H.	Hakim PN Gunungsitoli	WKPN PN Sibuhuan	707/DJU/SK.KP4.1.3/VI/2024 27 Juni 2004
3	Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H.	Hakim PN Gunungsitoli	Hakim PN Binjai	707/DJU/SK.KP4.1.3/VI/2024 27 Juni 2004
4	Daniel Kemit, S.H.	Panitera PN Gunungsitoli	Panitera PN Binjai	641/DJU/SK.KP4.1.3/IV/2024 22 April 2024
5	Arifmen Kristian Lase, S.H.	Panitera Pengganti PN.Gunungsitoli	Panitera Muda Hukum PN Sibolga	641/DJU/SK.KP4.1.3/IV/2024 22 April 2024
6	Devyanti Silitonga, S.E.	Klerek-Penata Layanan Operasional PN Gunungsitoli	Klerek-Penata Layanan Operasional PN Gunungsitoli	3809/SEK/SK.KP4.1.3/VIII/2024 21 Agustus 2024

B. Promosi

Tabel 17. Data Promosi Aparatur PN Gunungsitoli

No	Nama	Jabatan Lama	Promosi	Nomor dan Tanggal SK
1	Trisman Zandroto	Panitera Muda Hukum PN Gunungsitoli	Panitera Muda Pidana PN Gunungsitoli	1104/DJU/SK4.1.3/X/2024 18 Oktober 2024

C. Pensiun

Tabel 18. Data Pensiun Aparatur PN Gunungsitoli

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Batas Usia	TMT
1	Yulidarman Zendrato, S.H.	19810727200 6041009	Penata Tk. I (III/d)	43 Thn	04-09-2024

D. Diklat

Tabel 19. Data Diklat Aparatur PN Gunungsitoli

No	Nama	NIP	Pangkat /Gol. Ruang	Jabatan	Acara
1	Dody Rahmanto,S.H.,M.H	197803032001121004	IV/b	WKPN	Diklat SPPA
2	Dody Rahmanto,S.H.,M.H	197803032001121004	IV/b	WKPN	Pelatihan di Bidang Perpajakan
3	Devyanti Silitonga	198912012019032006	III/b	Penata Layanan Operasional	Pelatihan SPIP
4	Rahel Ovitalia Sianipar, A.Md.,A.B	199810282020122001	II/c	Arsiparis /Terampil	Pelatihan Pengelolaan Arsip Dinamis

E. Surat Keputusan yang telah dikeluarkan selama tahun 2024

No	Surat keputusan	Nomor sk	Tanggal sk	Yang menandatangani
1	Tentang ketentuan jam kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	1/KPN/SK/I/2024	9-1-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
2	Tentang penetapan pakaian dinas dan tanda pengenal bagi Hakim, aparatur sipil negara dan PPNPN Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	2/KPN/SK/I/2024	9-1-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
3	Tentang maklumat pelayanan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	3/KPN/SK/I/2024	9-1-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
4	Tentang penelaah eksekusi Pengadilan Negeri Gunungsitoli	4/KPN/SK/I/2024	9-1-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
5	Tentang penunjukan Hakim pengawas bidang Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	5/KPN/SK/I/2024	9-1-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
6	Tentang penunjukan Hakim pengawas dan pengamat pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	6/KPN/SK/I/2024	9-1-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
7	Tentang pembentukan susunan majelis Hakim dan Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	7/KPN/SK/I/2024	9-1-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
8	Tentang pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli	8/KPN/SK/I/2024	9-1-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
9	Tentang penunjukan Wakil Ketua sebagai koordinator pengawasan Pengadilan Negeri Gunungsitoli	9/KPN/SK/I/2024	9-1-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
10	Tentang Penunjukan Tim penegakan Displin Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	10/KPN/SK/I/2024	9-1-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
11	Tentang Penunjukan Hubungan Masyarakat (Humas) Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2024	11/KPN/SK/I/2024	9-1-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
12	Tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	12/KPN/SK/I/2024	9-1-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
13	Tentang Penunjukan Juru Bicara pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2024	13/KPN/SK/I/2024	9-1-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
14	Tentang Penunjukan tim evaluasi Standar	14/KPN/SK/I/2024	9-1-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

	Operasional Prosedur (SOP) Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli			
15	Tentang Pembentukan tim pengelola informasi dan dokumentasi pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	15/KPN/SK/I/2024	9-1-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
16	Tentang Pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	16/KPN/SK/I/2024	9-1-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
17	Tentang Pembentukan tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	17/KPN/SK/I/2024	9-1-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
18	Tentang Penunjukan Hakim sebagai mediator Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	18/KPN/SK/I/2024	9-1-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
19	Tentang Pembentukan tim penyusun standar pelayanan peradilan Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	19/KPN/SK/I/2024	9-1-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
20	Tentang Pembentukan tim pengendalian gratifikasi Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	20/KPN/SK/I/2024	9-1-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
21	Tentang Penunjukkan tim penanganan benturan kepentingan Pengadilan Negeri Gunungsitoli	21/KPN/SK/I/2024	9-1-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
22	Tentang Petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	22/KPN/SK/I/2024	9-1-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
23	Tentang Penunjukkan tim penilai reward dan punishment Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	23/KPN/SK/I/2024	9-1-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

24	T e n t a n g Penunjukan tim pengelola website, media sosial dan intranet Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	24/KPN/SK/I/2024	9-1-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
25	Tentang Pembentukan satuan tugas sistem informasi Penelusuran perkara (satgas sipp) Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	25/KPN/SK/I/2024	10-1-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
26	Tentang Penunjukkan manajer supervisi pelayanan terpadu satu pintu (ptsp) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	26/KPN/SK/I/2024	10-1-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
27	Tentang Penunjukan petugas meja pengaduan dan operator aplikasi sistem informasi pengawasan ma-ri (siwas ma-ri) Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	27/KPN/SK/I/2024	10-1-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
28	Tentang Pembentukan tim penanganan pengaduan Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	28/KPN/SK/II/2024	12-2-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
29	Tentang Penunjukan notulis rapat Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	29/KPN/SK/II/2024	12-2-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
30	Tentang Pembentukan tim pelayanan terpadu satu pintu (ptsp)	30KPN/SK/II/2024	12-2-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
31	Tentang Standar pelayanan peradilan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	31/KPN/SK/II/2024	12-2-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
32	Tentang Pedoman pengaduan masyarakat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli	32/KPN/SK/II/2024	12-2-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
33	Tentang	33/KPN/SK/II/2024	12-2-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

	Pembentukan tim survei indeks kepuasan masyarakat (ikm) Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli			
34	Tentang Pembentukan tim survei indeks persepsi korupsi (IPK) Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	34/KPN/SK/II/2024	12-2-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
35	Tentang Penunjukan petugas kuasa pengguna biaya proses, pembuat komitmen, bendahara dan staf pelaksanaan biaya proses penyelesaian perkara pihak ketiga Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	35/KPN/SK/II/2024	12-2-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
36	Tentang Penunjukan petugas sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional-layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (sp4n-lapor) Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	36/KPN/SK/II/2024	12-2-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
37	Tentang Penunjukkan admin sertifikasi mutu Pengadilan unggul dan tangguh (ampuh) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	37/KPN/SK/II/2024	12-2-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
38	Tentang penunjukan Plh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli	38/KPN/SK/KP7.1/II/2024	23-2-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
39	Tentang penunjukan Plh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli	39/KPN/SK/KP7.1/III /2024	1-3-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
40	Tentang penunjukan Plh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli	40/KPN/SK/KP7.1/IV /2024	1-4-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
41	Tentang penunjukan Plh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli	41/KPN/SK/KP7.1/IV /2024	3-4-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
42	Tentang Penempatan calon pegawai Negeri sipil Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	42/KPN/SK/V/2024	2-5-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
43	Tentang Penempatan calon pegawai Negeri sipil Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	43/KPN/SK/V/2024	2-5-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

44	Tentang Penunjukan petugas <i>e-court</i> Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	44/KPN/SK/V/2024	2-5-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
45	Tentang Penunjukan petugas pemeriksaan berkas perkara (inzage) Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	45/KPN/SK/V/2024	2-5-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
46	Tentang Pejabat pengelola, penanggungjawab, pengawas dan petugas pelayanan terpadu satu pintu (ptsp) Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	46/KPN/SK/V/2024	2-5-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
47	Tentang Pemberian kompensasi keterlambatan pelayanan Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	47/KPN/SK/V/2024	2-5-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
48	Tentang Pemberlakuan standar operasional prosedur (sop) Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	48/KPN/SK/V/2024	2-5-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
49	Tentang penunjukan Plh sekretaris Pengadilan Negeri Gunungsitoli	49/KPN/SK/V/2024	27-5-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
50	Tentang Penempatan calon pegawai Negeri sipil Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	50/KPN/SK/V/2024	27-5-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
51	Tentang penunjukan Plh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli	51/KPN/SK/VI/2024	5-6-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
52	Tentang penunjukan Plh sekretaris Pengadilan Negeri Gunungsitoli	52/KPN/SK/VI/2024	5-6-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
53	Tentang Penunjukan petugas kuasa pengguna biaya proses, pembuat komitmen, bendahara dan staf pelaksanaan biaya proses penyelesaian perkara pihak ketiga Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	53/KPN/SK/VI/2024	11-6-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
54	Tentang Penunjukan tim penelaah eksekusi Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	54/KPN/SK/VI/2024	11-6-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
55	Tentang Penunjukan tim implementasi Aplikasi elektronik berkas pidana terpadu	55/KPN/SK/VI/2024	11-6-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

	(e-berpadu) Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli			
56	Tentang Penetapan hari sidang perkara tindak pidana ringan (tipiring) dan perkara tindak pidana lalu lintas (tilang) Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	56/KPN/SK/VI/2024	11-6-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
57	Tentang Penunjukkan petugas penerima tamu (resepsionis) Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	57/KPN/SK/VI/2024	11-6-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
58	Tentang Rapat berjenjang dan rapat bulanan Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	58/KPN/SK/VI/2024	11-6-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
59	Tentang Pedoman pengawasan internal	59/KPN/SK/VI/2024	11-6-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
60	Tentang Penetapan jadwal pengawasan Hakim pengawas bidang Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	60/KPN/SK/VI/2024	11-6-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
61	Tentang Pembentukan tim pengelola informasi Dan dokumentasi pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	61/KPN/SK/VI/2024	11-6-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
62	Tentang penunjukan Plh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli	62/KPN/SK/VII/2024	8-7-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
63	Tentang penunjukan Plh sekretaris Pengadilan Negeri Gunungsitoli	63/KPN/SK/VII/2024	19-7-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
64	Tentang penunjukan Plh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli	64/KPN/SK/VII/2024	19-7-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
65	Tentang penunjukan Plh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli	65/KPN/SK/VII/2024	25-7-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
66	Tentang penunjukan penilai PPNPN Pengadilan Negeri Gunungsitoli	66/KPN/SK/VII/2024	5-8-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
67	Tentang penunjukan Plh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli	67/KPN/SK/VIII/2024	5-8-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
68	Tentang penunjukan Plh sekretaris Pengadilan Negeri Gunungsitoli	68/KPN/SK/VIII/2024	5-8-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
69	Tentang pemberlakuan SEMA No.10	69/KPN/SK/VIII/2	12-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri

	tahun 2005	024		Gunungsitoli
	Tentang Penunjukan Hakim sebagai mediator Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	70/KPN/SK/VIII/2 024	12-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
70	Tentang Penunjukan Hakim pengawas bidang Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	70/KPN/SK/VIII/2 024	12-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
71	Tentang Pembentukan susunan majelis Hakim dan Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	71/KPN/SK/VIII/2 024	12-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
72	Tentang Penunjukan Hakim sebagai mediator Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	72/KPN/SK/VIII/2 024	12-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
73	Tentang Penunjukan hubungan masyarakat (HUMAS) Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2024	73/KPN/SK/VIII/2 024	12-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
74	Tentang Penunjukan juru bicara pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2024	74/KPN/SK/VIII/2 024	12-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
75	Tentang Pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (wbk) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (wbbm)	75/KPN/SK/VIII/2 024	12-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
76	Tentang Penetapan jam kerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	76/KPN/SK/I/2024	12-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
77	Tentang Penetapan pakaian dinas dan tanda pengenal bagi Hakim, aparatur sipil negara dan PPNPN Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	77/KPN/SK/VIII/2 024	12-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
78	Tentang	78/KPN/SK/VIII/2	12-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri

	Maklumat pelayanan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	024		Gunungsitoli
79	Tentang Pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli	79/KPN/SK/III/2024	12-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
80	Tentang Penunjukan tim penegakan disiplin Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	80/KPN/SK/VIII/2024	12-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
81	Tentang Pembentukan tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	81/KPN/SK/VIII/2024	12-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
82	Tentang Penunjukan Wakil Ketua sebagai koordinator pengawasan Pengadilan Negeri Gunungsitoli	82/KPN/SK/VIII/2024	12-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
83	Tentang Penunjukan Hakim pengawas dan pengamat pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	83/KPN/SK/VIII/2024	12-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
84	Tentang Pembentukan tim pengelola informasi Dan dokumentasi pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	84/KPN/SK/VIII/2024	12-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
85	Tentang Penunjukan koordinator penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	85/KPN/SK/VIII/2024	12-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
86	Tentang Pembentukan satuan tugas sistem informasi Penelusuran perkara (satgas sipp) Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	86/KPN/SK/VIII/2024	12-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
87	Tentang Pembentukan tim pengendalian gratifikasi Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	87/KPN/SK/VIII/2024	12-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
88	Tentang	88/KPN/SK/VIII/2024	12-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

	Pembentukan tim penanganan pengaduan Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli			
89	Tentang Penunjukkan tim penilai reward dan punishment Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	89/KPN/SK/VIII/2024	12-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
90	Tentang Penunjukan tim evaluasi standar operasional prosedur (sop) Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	90/KPN/SK/VIII/2024	12-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
91	Tentang Penunjukkan tim penanganan benturan kepentingan Pengadilan Negeri Gunungsitoli	91/KPN/SK/VIII/2024	12-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
92	Tentang Pejabat pengelola, penanggungjawab, pengawas dan petugas pelayanan terpadu satu pintu (ptsp) Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	91/KPN/SK/VIII/2024	12-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
93	Tentang Penunjukkan manajer supervisi pelayanan terpadu satu pintu (ptsp) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	93/KPN/SK/VIII/2024	19-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
94	Tentang Penunjukan notulis rapat Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	94/KPN/SK/VIII/2024	19-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
95	Tentang penunjukan Plh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli	95/KPN/SK/VIII/2024	19-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
96	Tentang penunjukan plt Panitera muda pidana Pengadilan Negeri Gunungsitoli	96/KPN/SK/VIII/2024	19-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
97	Tentang penunjukan Plh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli	97/KPN/SK/VIII/2024	19-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
98	Penunjukan tim analis hasil penilaian pegawai pemerintah non pegawai Negeri Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	98/KPN/SK/VIII/2024	19-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
99	Tentang Penunjukan tim penelaah eksekusi Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	99/KPN/SK/VIII/2024	19-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
100	Tentang Pembentukan tim penyusun standar pelayanan peradilan	100/KPN/SK/VIII/2024	19-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

	Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli			
101	Tentang pengawasan internal Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	101/KPN/SK/VIII/2024	19-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
102	Tentang Penetapan jadwal pengawasan Hakim pengawas bidang Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	102/KPN/SK/VIII/2024	19-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
103	Tentang Penunjukkan admin sertifikasi mutu Pengadilan unggul dan tangguh (ampuh) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	103/KPN/SK/VIII/2024	19-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
104	Tentang Standar pelayanan peradilan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	104/KPN/SK/VIII/2024	19-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
105	Tentang Pembentukan tim penanganan manajemen resiko Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	105/KPN/SK/VIII/2024	19-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
106	Tentang Penunjukkan tim penilai reward dan punishment Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	106/KPN/SK/VIII/2024	19-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
107	Tentang Pemberian kompensasi keterlambatan pelayanan Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	107/KPN/SK/VIII/2024	19-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
108	Tentang Penunjukan Hakim pengawas dan pengamat pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	108/KPN/SK/VIII/2024	19-08-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
109	Tentang Penunjukan tim evaluasi standar operasional prosedur (sop) Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	109/KPN/SK/IX/2024	9-9-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
110	Tentang Pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (wbk) dan wilayah birokrasi	110/KPN/SK/IX/2024	10-09-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

	bersih dan melayani (wbbm) Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli			
111	Tentang Pembentukan tim survei indeks kepuasan masyarakat (ikm) Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli	111/KPN/SK/IX/20 24	10-09-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
112	Tentang Pembentukan tim survei indeks persepsi korupsi (IPK) Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	112/KPN/SK/IX/20 24	10-09-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
113	Tentang Pembentukan tim audit internal pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	113/KPN/SK/X/20 24	25-10-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
114	Tentang Penunjukan tim pengelola website, media sosial (facebook, instagram, youtube) dan intranet Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	114/KPN/SK/X/20 24	25-10-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
115	Tentang Penunjukan juru sumpah persidangan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	115/KPN/SK/XI/20 24	6-11-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
116	Tentang Penunjukan juru bahasa persidangan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	116/KPN/SK/XI/20 24	6-11-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
117	Tentang Penunjukan petugas kuasa pengguna biaya proses, pembuat komitmen, bendahara dan staf pelaksanaan biaya proses penyelesaian perkara pihak ketiga Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	117/KPN/SK/XI/20 24	6-11-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
118	Tentang Penunjukan pelaksana tugas (plt) Panitera muda hukum Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	118/KPN/SK/XI/20 24	18-11-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
119	Tentang Penunjukan hubungan masyarakat	119/KPN/SK/XI/20 24	19-11-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

	(humas) Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2024			
120	Tentang Pembentukan tim pengelola informasi Dan dokumentasi pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	120/KPN/SK/XI/20 24	19-11-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
121	Tentang Pembentukan tim survei indeks persepsi korupsi (IPK) Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	121/KPN/SK/XI/20 24	19-11-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
122	Tentang Pembentukan tim survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	122/KPN/SK/XI/20 24	19-11-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
123	Tentang Penunjukan petugas meja pengaduan dan operator aplikasi sistem informasi pengawasan MA-RI (Siwas MA-RI)	123/KPN/SK/XI/20 24	19-11-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
124	Tentang Pembentukan tim penanganan pengaduan Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	124/KPN/SK/XI/20 24	19-11-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
125	Tentang Pejabat pengelola, penanggungjawab, pengawas dan petugas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	125/KPN/SK/XI/20 24	19-11-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
126	Tentang Penunjukkan manajer supervisi pelayanan terpadu satu pintu (ptsp) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	126/KPN/SK/XI/20 24	19-11-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
127	Tentang Penunjukan pelaksana harian (Plh) Panitera Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	127/KPN/SK/XI/20 24	22-11-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
128	Tentang Pembentukan panitia seleksi lembaga	128/KPN/SK/XII/2 024	9-12-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

	penyedia layanan pos bantuan hukum (posbakum)			
129	Tentang Penunjukan tim teknis penyusunan kerangka acuan kerja lembaga penyedia layanan pos bantuan hukum (posbakum) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	129/KPN/SK/XII/2024	9-12-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
130	Tentang Penunjukan petugas <i>e-court</i> Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	130/KPN/SK/XII/2024	9-12-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
131	Tentang Penunjukan petugas pemeriksaan berkas perkara (inzage) Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	131/KPN/SK/XII/2024	9-12-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
132	Tentang Penunjukan petugas sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional-layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (SP4N-LAPOR) Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	132/KPN/SK/XII/2024	9-12-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
133	Tentang Penunjukan tim pengendalian aktivitas Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli	1/KPN/SK/I/2024	9-12-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
134	Tentang penunjukan Plh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli	1/KPN/SK/I/2024	9-12-2024	Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli



BAB IV

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

B A B IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI
INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Realisasi Anggaran DIPA-005.01.2.098696/2024 T.A 2024 Tanggal 31 Desember 2024

Tabel 20. Realisasi Anggaran DIPA-005.01.2.098696 Tahun 2024

AKUN	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
51	Belanja Pegawai	3,626,472,000	3,545,242,531	81,229,469	97,76
52	Belanja Barang	1,812,731,000	1,802,760,739	9,970,261	99,45

1. Belanja Pegawai

Tabel 21. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024

AKUN	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,518,070,000	1,447,544,300	70,525,700	95,35
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25,000	23,525	1,475	94,10
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	95,547,000	95,544,850	2,150	100
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	33,772,000	33,770,334	1,666	100
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28,840,000.	28,840,000	0	100,00
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,339,745,000	1,339,010,000	735,000	99,76
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	186,509,000.	186,506,082	2,918	100
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	79,082,000	78,358,440	723,560	99,09
511129	Belanja Uang Makan PNS	227,172,000	222,355,000	4,817,000	97,88
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	20,510,000	20,140,000	370,000	98,20
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	97,200,000	93,150,000	4,050,000	99,72

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2024 senilai **Rp 3,626,472,000,- atau 97,76%**. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 naik dibandingkan realisasi Tahun 2023 senilai **Rp. 3,453,216,611,- atau 94%**. hal ini dikarenakan adanya penyesuaian dengan Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

2. Belanja Barang

Tabel 22. Realisasi Belanja Barang Tahun 2024

AKUN	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	380,551,000	380,501,000	50,000	99,99
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	76,205,000	76,080,000	125,000	99,84
521841	Belanja Barang Persediaan	0	0	0	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16,200,000	13,216,000	2,984,000	81,58
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	230,218,000	229,863,453	354,547	99,85
522112	Beban Langganan Telepon	900,000	860,440	39,560	95,60
522113	Beban Langganan Air	2,400,000	931,686	1,468,314	38,82
522141	Beban Sewa	3000000	3,000,000	0	100
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	335,529,000	334,931,900	597,100	99,82
523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	146,500,000	146,499,400	600	100
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	230,218,000	229,863,453	354,547	99,85
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	31,081,000	31,080,000	0	100
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5,184,000	4,009,000	1,175,000	77,33
524111	Belanja Perjalanan Biasa	169,561,000	169,561,000	0	100

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2024 senilai **Rp. 1,802,760,739,-** atau **99,45%**. Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 naik dibandingkan realisasi Tahun 2023 senilai **Rp. 1,811,375,377,-** atau **99,00 %**.. Hal ini dikarenakan penggunaan dana pemeliharaan peralatan dan mesin lebih maksimal

2. Realisasi Anggaran DIPA-005.03.2.099198/2023 Tanggal 31 Desember 2024

Tabel 24. Realisasi Anggaran DIPA-005.03.2.099198 Tahun 2024

AKUN	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
522131	Beban Jasa Konsultan	36,000,000	36,000,000	0	100,00
524111	Belanja Perjalanan Biasa	228,000,000	228,000,000	0	100,00
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	865,000	540,500	324,500	62,49
521211	Belanja Bahan	2,288,000	2,240,000	48,000	97,90
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	56,516,000	56,498,000	18,000	99,97
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3,600,000	3,600,000	200,000	94,44

Realisasi Belanja Peningkatan Manajemen Peradilan Umum DIPA -03 Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2024 senilai **Rp 350,035,000.-** atau **96,76 %**.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

a. Pemeliharaan

Tabel 26. Pemeliharaan Tahun 2024

Uraian	Realisasi
1	2
Pemeliharaan Gedung & Bangunan	Rp. 334,931,900,-
Pemeliharaan Gedung & Bangunan Lainnya	Rp. 146,499,400,-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp. 229,863,453,-
Jumlah	Rp. 711,294,753,-

b. Penghapusan

Tabel 27. Penghapusan Tahun 2024

Uraian	Realisasi
1	2
NIHIL	
Jumlah	Rp. 0,-

c. Daftar Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Tabel 28. Keadaan Perangkat Keras Tahun 2024

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	*Ket
	Pos Jaga	1	
	Parkir Roda 4 dan Roda 2	2	
	Mushola	1	
	Kantin	1	
	Gudang	1	
I Gedung Utama			
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	2	
4	Ruang JuruSita	0	
5	Ruang Panitera/Jurusita	1	
6	Ruang Panitera Muda Perdata	1	
7	Ruang Panitera Muda Pidana	1	
8	Ruang Panitera Muda Hukum	1	
9	Ruang Sekretaris	1	
10	Ruang PTIP	1	
11	Ruang Kepegawaian, Ortala	1	
12	Ruang Umum dan Keuangan	1	
13	Ruang Arsip	1	
14	Ruang Perpustakaan	1	
15	Ruang Sidang Umum	3	
16	Ruang Tunggu Sidang Anak	1	
17	Ruang Diversi / Mediasi	1	
18	Ruang Tahanan	2	
19	Ruang Tunggu Jaksa	1	
21	Ruang Menyusui/Laktasi	1	
22	Ruang Posbakum	1	
23	Ruang Command Center	1	
III Fasilitas			
1	PC Unit	32	
2	Personal Komputer lainnya	3	
3	Laptop dan notebook	17	
4	Printer	22	
5	Scanner	4	
6	LCD Projector/Infocus	1	
7	Pesawat Telephone	1	
8	AC	13	
9	Genset	2	

10	CCTV	1	
11	Server	2	
12	Rak Server	1	
13	Kursi Pengunjung (Besi Stenlis Panjang)	10	
14	Telephone Fax	1	
15	Lemari kayu	34	
16	Rak Besi Arsip	3	
17	Brankas	2	
18	Internet	1	Astinet 1:1 Indie Home 70Mbps
19	Lemari Besi Metal	8	
20	Filling Cabinet Besi	19	
21	Televisi	2	
22	Kursi Dorong	20	

F. Kendaraan Dinas

Tabel 29. Keadaan Kendaraan Dinas Tahun 2024

No	Uraian	Tahun Perolehan	kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	MiniBus	2005	v			
2	MiniBus	2009	v			
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	YAMAHA	1997			v	
2	HONDA	2005	v			
3	HONDA	2005	v			
4	HONDA	2007	v			
5	HONDA	2008	v			
6	HONDA	2008	v			
7	HONDA	2008	v			
8	HONDA	2008	v			

G. Rumah Dinas

H. Tabel 30. Keadaan Rumah Dinas Tahun 2024

No	Nama Barang	Luas	Keterangan
1	2	3	4
1	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	175	Rumah Dinas Hakim
2	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	175	Rumah Dinas Hakim
3	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	175	Rumah Dinas Hakim
4	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	175	Rumah Dinas Hakim
5	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	240	Rumah Dinas ketua
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1961	Kantor
7	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	175	Rumah Dinas Wakil Ketua
8	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	175	Rumah Dinas Sekretaris
9	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	175	Rumah Dinas Panitera

10	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	100	Teluk Dalam Nias Selatan
11	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	100	Pulau Tello Nias Selatan

I. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan public menuju layanan prima, dengan mencoba mencanangkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan birokrasi yang gesit dan profesional dalam memberikan pelayanan yang maksimal, bermartabat, transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan visi misi yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI.

Pada Tahun 2024, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah membuat terobosan inovasi yang merupakan hasil karya dari Team IT Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Inovasi tersebut diberi nama Sistem Pendaftaran Antrian Online, fasilitas pengubah suara menjadi teks bagi tunarungu, video Bahasa isyarat bagi tuna rungu untuk optimalisasi tata tertib sidang dan layanan informasi. Aplikasi ini di tujukan pada masyarakat atau pencari keadilan pada pengadilan negeri Gunungsitoli, yaitu dengan memudahkan mereka untuk mengambil nomor antrian secara online dimana dan kapanpun. Sedang aplikasi pengubah suara menjadi teks target pengguna nya adalah Masyarakat yang memiliki keterbatasan khususnya tuna rungu Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang sedang mengikuti siding dan yang terakhir video Bahasa isyarat yang dapat diakses dari website Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan video infomasi yang dapat dilihat pada layanan PTSP Pengadilan Negeri Gunungsitoli ditujukan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan khususnya tuna rungu, jadi dapat membantu para kaum disabilitas dalam mendapatkan pelayanan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Ke empat aplikasi ini dirilis pada waktu yang bersamaan , dirilis pada bulan pada bulan Oktober 2022. Keempat aplikasi ini telah disosialisasikan kepada seluruh pengguna di beberapa kali kegiatan seperti di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Khusus untuk pengguna aplikasi system pendaftaran antrian online, Pengadilan Negeri Gunungsitoli Sistem Pendaftaran Antrian Online pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, terbagi 2, yaitu Umum dan Difable, manfaat dari Sistem Pendaftaran Antrian Online adalah mengurangi kerumunan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli demi keamanan dan kenyamanan para pencari keadilan, pelayanan yang diberikan oleh Pegawai PTSP Pengadilan Negeri Gunugsitoli menjadi lebih cepat dan tepat waktu, para pencari keadilan bisa menghemat waktu ketika mengantri, dengan datang sesuai dengan jam yang ditentukan, dan media untuk Promosi Produk Produk layanan Mahkamah

Agung dan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, karena di halaman pengambilan nomor antrian online, di tampilkan produk produk layanan MAhkamah Agung dan Pengadilan Negerri Gunungsitoli.

Keunggulan yang dimiliki Sistem Pendaftaran Antrian Online adalah nomor antrian online Pengadilan Negeri Gunungsitoli dapat diambil kapan dan dimana saja, tersedia di Website Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang sudah ramah dengan tampilan berbasis android/ios, tersedia Kartu Antrian Online Digital yang tidak perlu dicetak, sehingga mengurai pemakaian kertas, dan pendataan yang sudah digital sehingga mempermudah petugas mengelola data pencari keadilan sebagai bahan monitoring dan evaluasi.

Terbaru, pengubah suara menjadi teks khusus penyandang tuna rungu, pada ruang sidang Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sehingga penyandang tuna rungu dapat mengikuti sidang dengan baik tanpa ada terkendala. Disamping itu, optimalisasi pelayanan juga semakin ditingkatkan dengan adanya video video informasi yang ditujukan pada penyandang tuna rungu mengenai tata tertib sidang dan layanan informasi yang sudah tersedia pada website Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan video informasi pada layanan PTSP Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Di samping itu, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah menyiapkan tenaga SDM yang berkompeten sebagai Customer Service untuk melayani dan membantu masyarakat yang belum memahami cara mengakses aplikasi antrian online . Sejak aplikasi ini dirilis, beberapa pencari keadilan telah menggunakan aplikasi antrian online ini, karena dengan hadirnya aplikasi ini, Pengadilan Negeri Gunungsitoli juga meyakini bahwa terobosan inovasi ini hanya dimiliki oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli sehingga menjadi nilai positif bagi masyarakat yang telah merasakan manfaat penggunaan aplikasi ini.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli juga terus membenahi infrastruktur untuk mendukung peradilan dengan berbasis kepada Teknologi Informasi, dalam hal persidangan secara online, semenjak dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2021 terkait administrasi persidangan secara online, Pengadilan Negeri Gunungsitoli juga telah siap untuk menjalankan peraturan tersebut sehingga persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara online, baik di persidangan yang diadakan di Kota Gunungsitoli ataupun di Teluk Dalam Nias Selatan. Terkait pengembangan kompetensi, Pengadilan Negeri Gunungsitoli juga tetap konsisten mengikuti kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI meskipun dilaksanakan secara online/daring. Hal ini berimbas kepada seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang harus beradaptasi dengan kondisi tersebut, aparaturnya diwajibkan memiliki kemampuan dalam hal teknologi informasi agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik.

Adapun layanan yang ada di Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berbasis teknologi informasi adalah sebagai berikut ;

- Website Resmi PN Gunungsitoli : www.pn-gunungsitoli.go.id
- Sistem Pendaftaran Antrian Online
- Sistem Informasi Pelayanan Online PN Gunungsitoli (E-SIMPONI)
- Sistem Informasi Pelayanan Online melalui Whatsapp (SIMPOWA)
- Mesin Antrian dan Sistem Antrian
- E-Court
- Eraterang
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
- Sistem Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Sistem Informasi Perpustakaan
- Sistem Informasi Persuratan (PTSP)
- Sistem Informasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS)

Pengadilan Negeri Gunungsitoli kedepannya akan terus berusaha mengembangkan dan menciptakan inovasi demi memberikan pelayanan public yang professional dan bermutu.

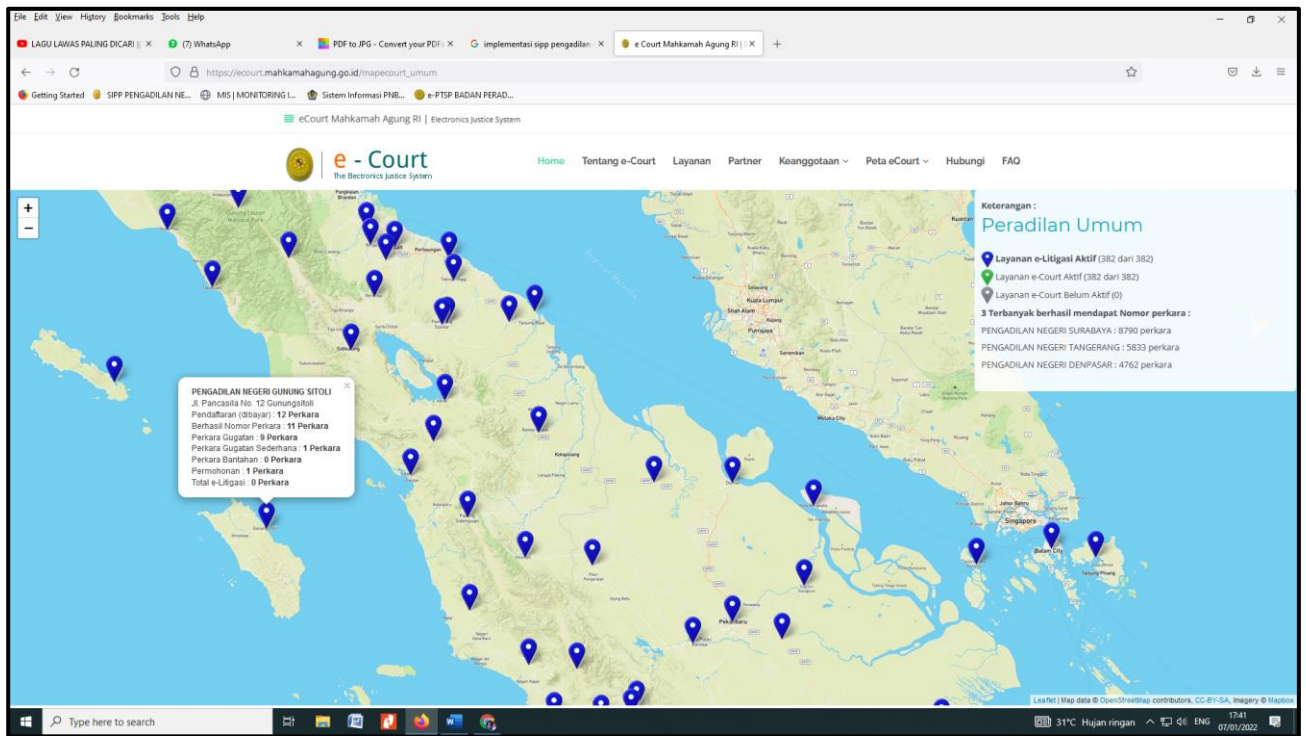
1. Implementasi e-Court

Implementasi e-Court di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sudah tersedia pojok e-Court dan petugas pelayanan serta admin e-Court. Selama e-court berjalan Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah mendapatkan 12 perkara yang di jalankan dengan menggunakan e-court dan telah putus 1 perkara . Namun dari ke 12 perkara, 1 perkara pendaftaran ditolak dikarenakan berkas yang belum lengkap.

Pojok E-Court PN Gunungsitoli



Aplikasi E-Court



2. Implementasi SIPP

Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah dilaksanakan dengan baik sepanjang tahun 2022 dengan Nilai Implementasi Akhir dari Monitoring Implementasi SIPP (MIS) yaitu sebesar 84,97%. Namun detail dari Implementasi SIPP belum dapat dilihat dari website Evaluasi Implementasi SIPP dikarenakan sedang mengalami pemeliharaan dan perbaikan aplikasi.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli juga telah melakukan update versi terbaru dari SIPP yaitu versi 5.1.0, demikian pula dengan Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP juga telah diupdate ke versi 5.1.0

Screenshoot SIPP Versi 5.1.0



BAB V

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

B A B V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjamin Mutu

Akreditasi penjaminan mutu Indonesia *Court Performance Excellent (ICPE)* merupakan ISO Plus. ICPE meliputi manajemen mutu ISO diperkaya dengan *International Framework Court Excellent (IFCE)* melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB), pembangunan zona integritas, standart pengawasan Badan Pengawasan MA dan standart penilaian Direktort Jenderal Badilum tahun 2014.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan Nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai dengan standart sertifikasi ISO 9001 : 2008. Tujuan pelaksanaan akreditasi penjaminan mutu pada setiap badan Peradilan di Indonesia, khususnya Badan Peradilan Umum adalah untuk mewujudkan performa atau kinerja peradilan Indonesia yang unggul dan prima (*Indonesia Court Performance Excellent-ICPE*).

Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B telah berhasil memperoleh nilai A-Excellent yang diserahkan Dirjen Badan Peradilan Umum di Makassar pada tanggal 28 November 2017. Untuk sampai pada tahap ini, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah melakukan langkah-langkah pembenahan yang melibatkan semua unsur, mulai dari unsur Pimpinan sampai dengan tenaga honorer di PN Gunungsitoli. Beberapa langkah tersebut adalah :

***Pertama* : Pembinaan dan sosialisasi terus menerus.**

Pembinaan ini berfungsi untuk memastikan semua Hakim dan Pegawai bekerja demi mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen pimpinan harus bertransformasi menjadi komitmen bersama. Nilai-nilai pengabdian ditanamkan sehingga merubah budaya kerja (*culture set*) dan pola pikir (*mind set*). Pembinaan di PN Gunungsitoli dilakukan secara berkala, untuk pembinaan Hakim Pengawas terhadap Bagian yang diawasinya dilakukan sebulan sekali yakni setiap awal bulan. Rapat bulanan dilakukan setiap awal bulan, rapat khusus Panitera dengan para Panitera Muda dilakukan setiap bulan, demikian juga rapat khusus antara Sekretaris dan para Kasubag dilakukan setiap bulan, serta rapat khusus Sekretaris dan Kasubag Umum dan Keuangan dengan para tenaga honorer di PN Gunungsitoli yang dilakukan setiap bulan juga.

***Kedua* : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.**

Hakekat akreditasi yaitu pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi. Permulaannya yaitu dengan membentuk Tim Reformasi berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan Perpres Nomor 81 Tahun 2000 tentang Grand Design RB, maka sasaran hasil utama RB meliputi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas, organisasi yang bebas dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta peningkatan pelayanan publik.

Ketiga :Pembangunan Zona Integritas.

Pembangunan zona integritas berpedoman pada Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas, maka pembangunan dimulai dengan penandatanganan piagam pencanangan secara terbuka Tujuannya agar semua pihak dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan dalam program kegiatan RB, khususnya di bidang pencegahan dan peningkatan pelayanan publik. Seyogyanya penandatanganan piagam disaksikan oleh unsur masyarakat (perguruan tinggi/LSM), pihak kepolisian, kejaksaan, dan pihak pemerintah daerah.

Keempat membenahan sarana pelayanan publik.

Pembenahan dapat dimulai dengan menerapkan konsep 5 R (ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin). Sarana-prasarana harus rapi dan bersih. Sarana yang belum ada diadakan. Tidak harus mewah, tapi cukup membuat nyaman pengguna. Misalnya meja pelayanan terpadu, ruang sidang anak, ruang ramah anak, ruang tahanan laki-laki dan perempuan, ruang penuntut umum, ruang ibu menyusui, ruang mediasi, ruang kaukus, ruang pengunjung berikut fasilitasnya, ruang tamu terbuka, ruang posbakum, sarana *difable*, tempat parkir pengunjung dan mobil tahanan, serta tempat merokok.

Pembuatan ruangan dapat disiasati dengan memanfaatkan ruang-ruang yang sudah ada. Banner petunjuk pelayanan/penggunaan dan tanda-tanda arah dipajang di tempat yang mudah terlihat. Bila DIPA mengalokasikan, lengkapi dengan televisi di ruang pengunjung, CCTV, tabung pemadam kebakaran ringan (apar) dan genset. Tetapi bila belum, maka segera lakukan perencanaan (*strategic planning*) pengadaannya.

Kelima membenahan administrasi.

Acuannya Buku II Pedoman Administrasi Peradilan berikut peraturan-peraturan yang dibuat oleh MA maupun Badilum. Tentu ini telah diterapkan dalam praktek sehari-hari sering belum diterapkan dan meja informasi tidak sesuai Keputusan Dirjen Badilum No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik.

Keenam pembuatan dan pengesahan dokumen penjaminan mutu.

Dokumen meliputi sasaran mutu, kebijakan mutu, moto, struktur penjaminan mutu, manual mutu, Instruksi Kerja (IK) manajemen mutu dan SOP tiap unit. Untuk efektifitas maka perlu dibentuk tim penyusun dokumen. Penyusunan SOP berpedoman pada Persekma No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP. Seyogyanya tim penyusun SOP adalah unit yang bersangkutan.

Manual mutu atau panduan mutu berisi ruang lingkup sistem manajemen mutu, prosedur terdokumentasi, dan uraian dari interaksi proses-proses (*business process mapping*). Badan

peradilan umum telah memberikan contoh manual mutu, sehingga penyusunan tinggal menyesuaikan. Perihal sistem manajemen bekerja dituangkan dalam IK atau SOP. Tapi lebih baik menggunakan IK, karena SOP harus dalam format diagram alir bercabang (*branching flowchart*) sebagaimana ditentukan Persekma No. 002 Tahun 2012, sehingga menyusun IK lebih mudah daripada menyusun SOP. Di PN Gunungsitoli, terdapat 18 (delapan belas) IK, diantaranya IK manajemen representif, IK pengendalian dokumen, IK tinjauan manajemen, IK audit internal dan IK survei kepuasan pengguna.

Ketujuh pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Pedoman survei terdapat dalam Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 Tentang Pemberlakuan Aplikasi LENTERA, Sisuper (Survey IKM dan IPK) dan PERKUSI (Eksekusi) tanggal 8 April 2021, maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah mengimplementasikan pengisian survey secara digital melalui Aplikasi SISUPER sejak Triwulan ke III atau Bulan Juni tahun 2021. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2022 Triwulan I adalah 99,48% (Sembilan puluh sembilan koma empat puluh delapan persen) dalam kategori “Sangat Baik”, Triwulan Ke II adalah 98,97% (Sembilan puluh delapan koma Sembilan puluh tujuh persen) dalam kategori “Sangat Baik”, Triwulan Ke III adalah 97,59% (Sembilan puluh tujuh koma Lima puluh sembilan persen) dalam kategori “Sangat Baik”, Triwulan IV adalah 97,59% (Sembilan puluh tujuh koma Lima puluh sembilan persen) dalam kategori “Sangat Baik”.

Tabel 31. Rata-rata Skor Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Periode Desember 2024.

No.	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Ranking
1	Persyaratan	3,857	Sangat Baik	2
2	Prosedur	3,857	Sangat Baik	3
3	Waktu Pelayanan	3,929	Sangat Baik	9
4	Biaya/Tarif	3,857	Sangat Baik	4
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,857	Sangat Baik	7
6	Kompetensi Pelaksana	3,714	Sangat Baik	8
7	Perilaku Pelaksana	3,857	Sangat Baik	5
8	Prasarana, Sarana dan Kelengkapan	3,857	Sangat Baik	6
9	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	4,000	Sangat Baik	1

*data diambil dari aplikasi e-survey.badilum.mahkamahagung.go.id

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	
PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI	
NILAI INDEKS	
3,94 / 98,57 %	
Periode 1 Oktober 2023 sampai 31 Desember 2023	
JUMLAH	35 RESPONDEN
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 20 ORANG
	PEREMPUAN : 15 ORANG
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 1 ORG
	Diploma 2 : 0 ORG
	SD : 0 ORG
	Diploma 3 : 1 ORG
	SMP : 1 ORG
	S1 : 12 ORG
	SMU : 17 ORG
	S2 : 2 ORG
	Diploma 1 : 1 ORG
	S3 : 0 ORG
PEKERJAAN	PNS : 2 ORG
	SWASTA : 6 ORG
	TNI : 0 ORG
	WIRUSAHA : 4 ORG
	POLRI : 2 ORG
	TENAGA KONTRAK : 0 ORG
	LAINNYA : 21 ORG

Kedelapan pelaksanaan audit internal. Lazimnya audit internal dilakukan oleh para hakim untuk tujuan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Audit internal berguna untuk bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

Kesembilan pelaksanaan tinjauan manajemen. Rapat tinjauan manajemen membahas evaluasi kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Hasil survei kepuasan masyarakat dan audit internal harus menjadi pembahasan rapat sehingga diperoleh rekomendasi untuk perbaikannya.

Kesepuluh audit oleh Pengadilan Tinggi (PT). Sebelum dilakukan audit oleh TAPM-Badilum, maka harus meminta audit oleh Pengadilan Tinggi. Rekomendasi Pengadilan Tinggi harus segera ditindak lanjuti. Apabila Pengadilan Tinggi menganggap pengadilan tingkat pertama memenuhi syarat untuk dilakukan audit akreditasi, maka dapat ditindaklanjuti dengan memohon audit akreditasi TAPM Badilum.

Kesebelas audit akreditasi TAPM-Badilum. Semestinya dengan telah dilakukan audit internal dan pre audit PT, maka akan minim ketidaksesuaian. Nilai A bila mencapai *score* 700-1000, nilai B *score* 500-699, nilai C *score* 300-499 dan nilai D *score* 0-299.

DOKUMENTASI SERTIFIKASI TAPM
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI



B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah aktif sejak tanggal 01 Oktober 2017. Awalnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli masih dalam bentuk loket-loket. Namun setelah Pelayanan Terpadu di PN Gunungsitoli aktif, maka telah ditetapkan empat orang petugas di meja layanan terpadu, yakni : petugas untuk Kepaniteraan Pidana, petugas untuk Kepaniteraan Perdata, petugas untuk Kepaniteraan Hukum dan petugas untuk Bagian Umum dan Keuangan.

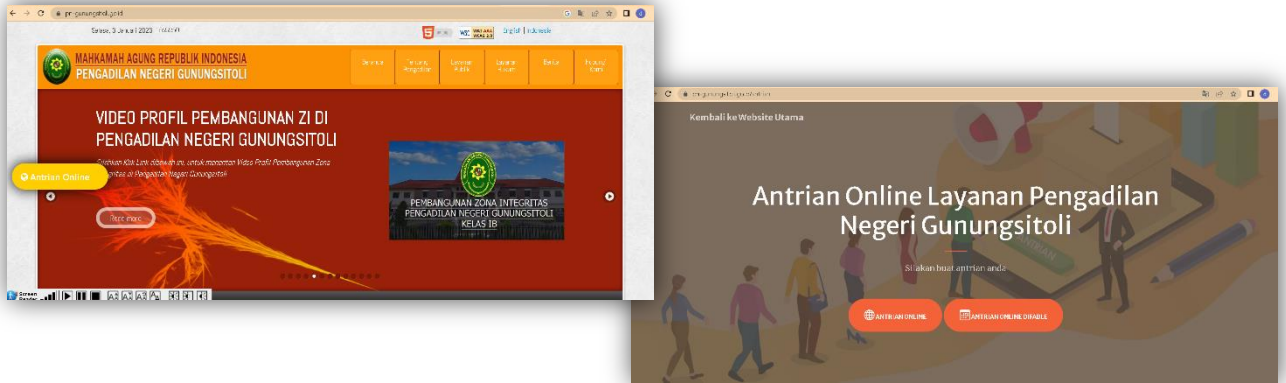


C. Inovasi Pelayanan publik

Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam menjalankan peran sebagai badan peradilan umum, terus melakukan inovasi dalam pengembangan aplikasi untuk kemudahan pelayanan kepada masyarakat Kab. Nias. Adapun aplikasi atau kegiatan yang ditujukan dalam pelayanan publik adalah sebagai berikut ;

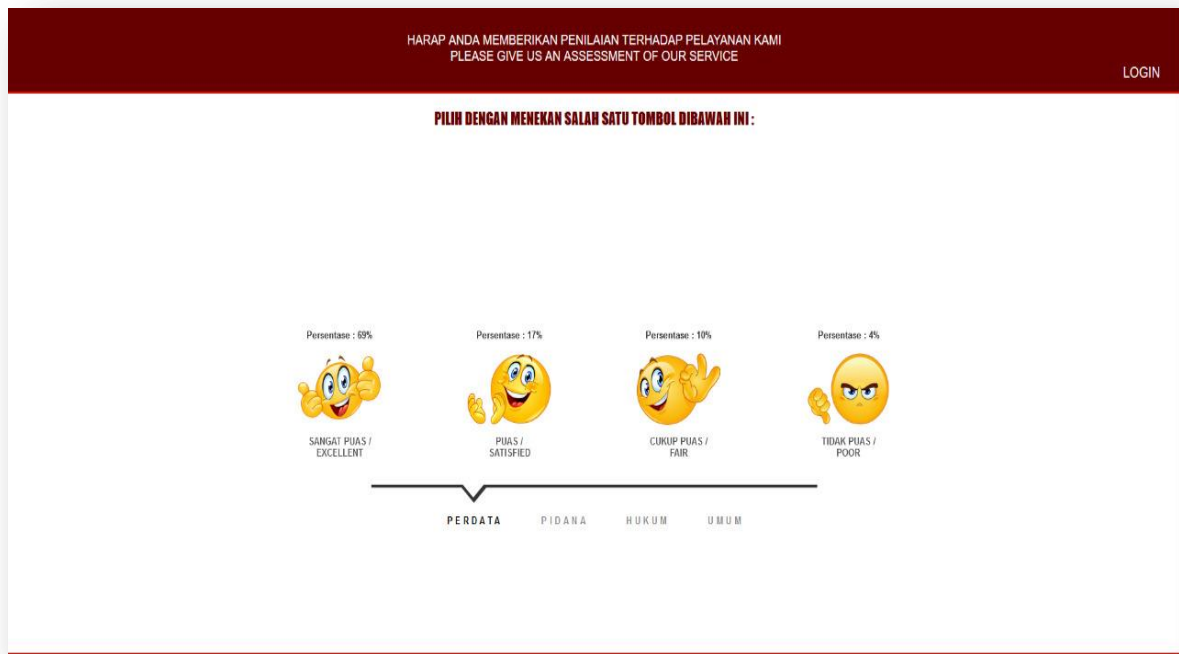
1. Sistem Pendaftaran Antrian Online

Pengadilan Negeri Gunungsitoli memiliki aplikasi system Pendaftaran Antrian Online, yang terbagi 2 bagian, untuk umum dan difabel yang berguna untuk memudahkan pelayanan public, sehingga masyarakat yang akan datang ke kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli sudah bisa mendapatkan no antrian secara online melalui perangkat handphone.



2. Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat

Pengadilan Negeri Gunungsitoli juga memiliki inovasi dalam mengembangkan aplikasi untuk mengukur sejauh mana kepuasan masyarakat Kab. Nias terhadap pelayanan aparaturnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Aplikasi ini telah digunakan dan dapat di monitoring untuk pembuatan laporan indeks kepuasan masyarakat



3. Aplikasi E-SIMPOWA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli memiliki daerah cakupan hukum yang luas sehingga banyaknya masyarakat yang ingin mencari informasi tentang pelayanan di pengadilan Negeri Gunungsitoli sehingga Pengadilan Negeri Gunungsitoli berinovasi untuk menciptakan layanan komunikasi yang dapat diakses dan memudahkan masyarakat di Kab. Nias dalam mencari informasi seputar pelayanan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Adapun inovasi yang dibuat adalah E-SIMPOWA (Sistem Informasi Pelayanan Online Melalui Whatsapp) yang akan membalas otomatis pertanyaan dari masyarakat seputar pelayanan peradilan. Layanan ini dapat diakses menggunakan aplikasi whatsapp. Layaknya berinteraksi dengan sesama pengguna whatsapp, layanan ini akan dibalas otomatis oleh system yang telah dirancang oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Dan layanan ini telah dapat digunakan oleh masyarakat sekitar Kab. Nias dengan menghubungi atau menambahkan kontak whatsapp 0822 4706 7035 (Whatsapp Pengadilan Negeri Gunungsitoli).

Screenshoot Aplikasi

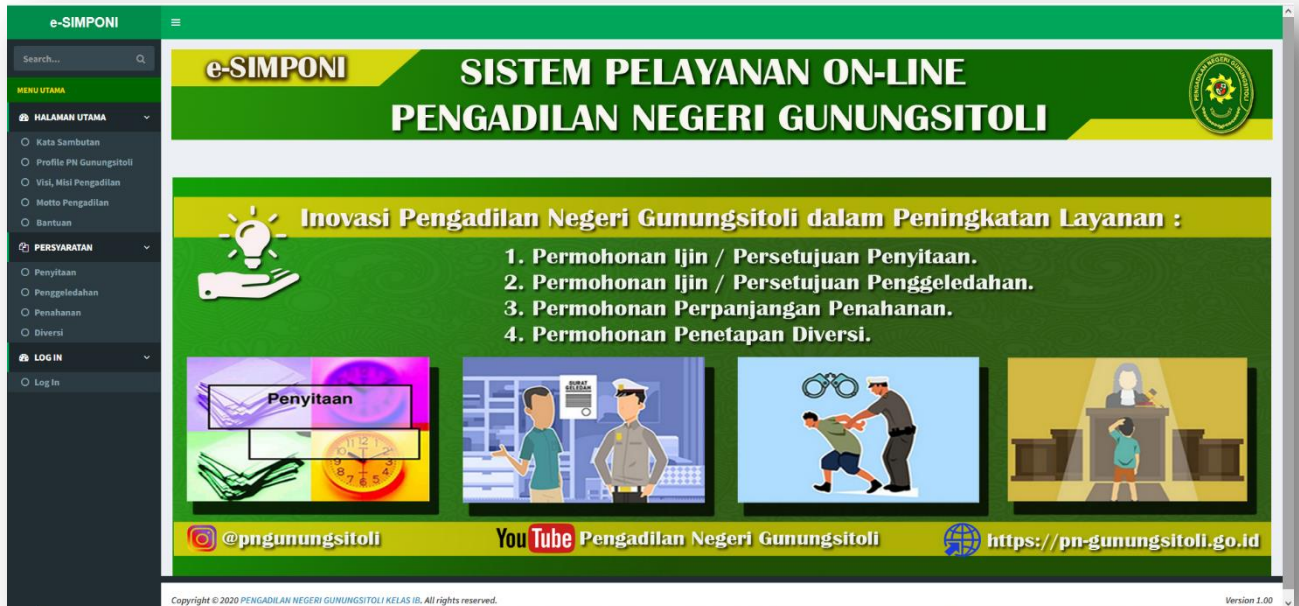


4. Aplikasi E-SIMPONI

Dalam rangka modernisasi pelayanan peradilan, Pengadilan Negeri Gunungsitoli membuat sebuah inovasi yang ditujukan untuk pihak Kepolisian, Kejaksaan, Penyidik Pemerintahan dan BNN serta instansi terkait. Pelayanan ini bertujuan untuk memudahkan dalam pengurusan ijin penyitaan, ijin penggeledahan, perpanjangan penahanan dan diversifikasi, seluruh pelayanan tersebut dilakukan secara online melalui aplikasi E-SIMPONI dengan alamat URL : www.simponi.pn-gunungsitoli.go.id. Aplikasi ini sendiri diluncurkan pada bulan Mei 2021, dan pada saat itu aplikasi ini masih menggunakan Google Docs sebagai sarana pengiriman dokumen sehingga dirasa perlu ditingkatkan ke tahap yang lebih baik. Pada bulan September 2021 aplikasi E-SIMPONI selesai diupgrade sehingga sudah menggunakan sistem informasi dan pemrograman yang dirancang untuk memudahkan pengiriman dokumen. Hingga saat ini tercatat sudah ada lebih dari 150 permohonan

yang masuk dari beragam instansi. Aplikasi ini juga menjadi sebuah kebanggaan bagi Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam mengembangkan lebih banyak inovasi pelayanan public, ke depannya Pengadilan Negeri Gunungsitoli juga memiliki rencana untuk membuat aplikasi yang dapat membantu efisiensi dan efektivitas pada pelayanan yang ada.

Screenshoot Aplikasi

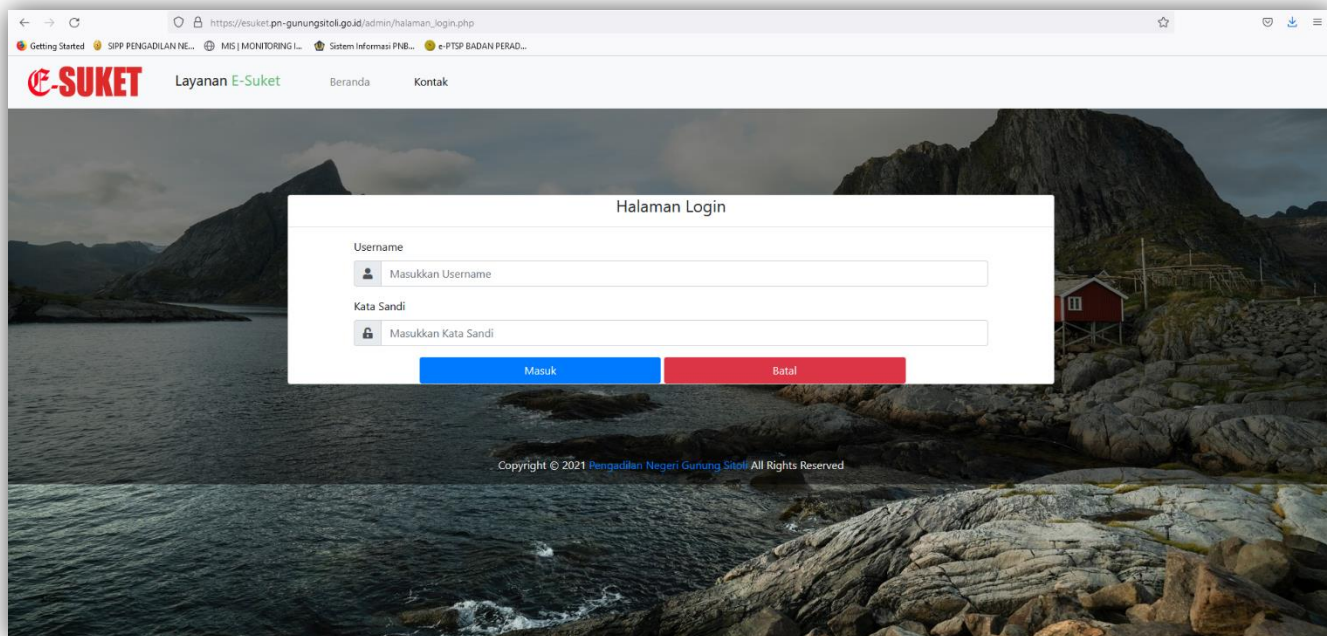


5. Aplikasi E-SUKET

Pengadilan Negeri Gunungsitoli kini telah memiliki terobosan inovasi terbaru untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus Surat Keterangan tanpa harus datang ke kantor. Inovasi tersebut diberi nama E-SUKET atau Elektronik Surat Keterangan. Aplikasi E-SUKET ini dihadirkan untuk menghadirkan pelayanan digitalisasi kepada masyarakat. Kemudahan yang diberikan ialah, Pemohon Surat Keterangan tidak diwajibkan hadir ke Kantor PN untuk mengurus Suket, cukup dari rumah dan menggunakan Laptop/HP, Suket bisa didapatkan dengan ketentuan dan syarat berlaku. Hal ini demi memangkas birokrasi yang riwet dan menghindari terjadinya percaloan dalam pengurusan surat keterangan. Aplikasi ini telah dirilis sejak bulan Oktober tahun 2021 dan mendapat antusias yang sangat tinggi dari masyarakat Kepulauan Nias. Dalam kegiatan launching nya, Pengadilan Negeri Gunungsitoli juga telah mensosialisasikan kepada seluruh stakeholder terkait bahwa output dari E-SUKET yang berupa Surat Keterangan Elektronik ialah sah dan resmi dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Adapun link untuk mengakses website aplikasi E-SUKET ialah www.esuket.pn-gunungsitoli.go.id. Aplikasi ini juga bergantung kepada aplikasi Eraterang yang merupakan inovasi dari Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI sebagai aplikasi

pengajuan permohonan surat keterangan. Selanjutnya aplikasi E-SUKET digunakan untuk mendapatkan output dari Surat Keterangan Elektronik yang telah di mohonkan.

ScreenShoot Aplikasi





BAB VI

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

B A B VI

PENGAWASAN

A. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dilaksanakan berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Peradilan Umum Nomor 8 Tahun 2004 yang berisi bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan para staff. Selain itu juga, pengawasan internal di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Bentuk pengawasan internal yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yaitu pengawasan langsung baik oleh atasan langsungnya maupun oleh Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan Pengamat PN Gunungsitoli :

Tabel 32. Data Hakim Pengawas Bidang dan Pengamat

No	Jabatan Pengawas	Jabatan/Gol Ruang	Nama Hakim
1	Koordinator Pengawas dan Pembinaan Keaniteraan dan Kesekretariatan	Hakim /Penata Tk I (III/d)	Achmadsyah Ade Mury, SH., MH
2	Pengawas Bidang Pidana	Penata (III/d)	Rocky Belmondo F. Sitohang, SH, MH
3	Pengawas Bidang Perdata	Penata (III/d)	Fadel P. Bate'e, SH, MH
4	Pengawas Bidang Hukum	Penata (III/d)	Junter Sijabat, SH., MH
5	Pengawas Bidang Umum dan Keuangan	Penata (III/d)	Achmadsyah Ade Mury, SH., MH
6	Pengawas bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Penata (III/d)	Achmadsyah Ade Mury, SH., MH
7	Pengawas bidang TI, Pelaporan dan Perencanaan	Penata (III/d)	Junter Sijabat, SH., MH

Setiap Hakim Pengawas Bidang melakukan pemeriksaan terhadap kinerja para pejabat dibidang kesekretariatan dan kepaniteraan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen yang meliputi tindakan sebagai berikut :

1. Memeriksa program kerja
2. Menilai dan mengawal hasil kegiatan
3. Memberikan saran-saran konstruktif untuk perbaikan

4. Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan
5. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Pengadilan atau Pejabat yang berkompeten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut.

B. Pengawasan Evaluasi

Pengawasan evaluasi di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah dibuat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Khusus untuk penanganan terhadap pengaduan masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Berikut tabel pengaduan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2024 :

Tabel 33. Rekapitulasi Pengaduan di PN Gunungsitoli Tahun 2024

NO	REKAPITULASI	JUMLAH
1	Jumlah Pengaduan Yang Diterima	-
2	Jumlah Pengaduan Yang Diteruskan Kepada Pengadilan Tingkat Banding	-
3	Jumlah Pengaduan Yang Diteruskan Kepada Badan Pengawas MA-RI	-
4	Jumlah Pengaduan Yang Sedang Ditangani	-
5	Jumlah Pengaduan Yang Telah Selesai Ditangani, LHP Disampaikan Kepada Pengadilan Tk. Banding	-
6	Jumlah Pengaduan Yang Telah Selesai Ditangani, LHP Disampaikan Kepada Badan Pengawas MA-RI	-
7	Jumlah Pengaduan Yang Terlapornya Dijatuhi Hukuman Disiplin	-

Berdasarkan data pada tabel diatas disimpulkan bahwa pengaduan yang diterima pada tahun 2024 nihil. Untuk jumlah pengaduan yang diteruskan kepada Bawas Mahkamah Agung RI dan jumlah pengaduan yang diteruskan kepada Pengadilan Tingkat Banding, jumlah pengaduan yang ditangani, jumlah pengaduan yang telah telah selesai ditangani LHP disampaikan kepada Pengadilan Tingkat Banding, jumlah pengaduan yang terlapornya dijatuhi hukuman disiplin semuanya nihil.

Adapun evaluasi dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi :

1. Manajemen peradilan :
 - a. Program kerja;
 - b. Pelaksanaan pencapaian target;
 - c. Pengawasan dan pembinaan;
 - d. Kendala dan hambatan;
 - e. Faktor-faktor yang mendukung;
 - f. Evaluasi kegiatan.
2. Adminitrasi perkara
 - a. Prosedur penerimaan perkara;;
 - b. Proedur penerimaan permohonan banding, kasasi, PK dan grasi;
 - c. Keuangan perkara;
 - d. Pemberkasan kearsipan dan pelaporan.
3. Adminitrasi persidangan dan pelaksanaan putusan :
 - a. Sistem pembagian perkara;
 - b. Penentuan majelis hakim;
 - c. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara;
 - d. Minutasi perkara.
4. Administrasi umum :
 - a. Kepegawaian;
 - b. Keuangan;
 - c. Umum (inventaris barang milik negara, perpustakaan, tata persuratan dan perkantoran serta kebersihan dan keamanan kantor).
5. Kinerja pelayanan publik :
 - a. Pengelolaan manajemen;
 - b. Mekanisme pengawasan;
 - c. Kepemimpinan;

- d. Pembinaan dan pengembangan SDM;
- e. Perawatan dan pemeliharaan inventaris;
- f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan;
- g. Kecepatan dan ketepatan penyelesaian perkara;
- h. Tingkat pengaduan masyarakat.



BAB VII

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berupaya secara maksimal untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat pencari keadilan dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang dimiliki;
2. Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berhasil meraih Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dengan nilai A (Excellent) yang diserahkan pada tanggal 31 Maret 2021 dan berlaku selama 1 (satu) tahun.
3. Sejalan dengan adanya reformasi birokrasi di dunia peradilan, maka dunia peradilan harus segera memperbaiki kinerja dan berfikir sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan guna terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung;
4. Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah diupayakan untuk menjamin pelaksanaan tugas administrasi perkara maupun administrasi umum.

B. REKOMENDASI

Untuk menghadapi tahun 2024 ini Pengadilan Negeri Gunungsitoli, berharap ada perbaikan dan penambahan pegawai dan fasilitas guna mengoptimalkan tugas dan fungsi kerja aparatur khususnya Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Gunungsitoli yaitu:

1. Diharapkan agar di Pengadilan Negeri Gunungsitoli diberikan tambahan hakim dan Pegawai;
2. Diharapkan agar pelatihan-pelatihan teknis yang berbasis kompetensi terus dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalisme aparat peradilan.
3. Dimohonkan agar diberikan aset BMN seperti meubelair, printer, laptop/PC dan peralatan persidangan teleconference untuk menunjang lancarnya kegiatan kinerja di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Gunungsitoli, 04 Januari 2024

KETUA PENGADILAN GUNUNGSITOLI

Zulfadly, S.H., M.H.

NIP 197609062001121002



LAMPIRAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI



PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
NOMOR : 2 /KPN/ SK/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Laporan Tahunan 2024 pada satuan kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2024 ;
2. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor : 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007;

7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Pemerintah.
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4506/SEK/OT1.6/XII/2024 Tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

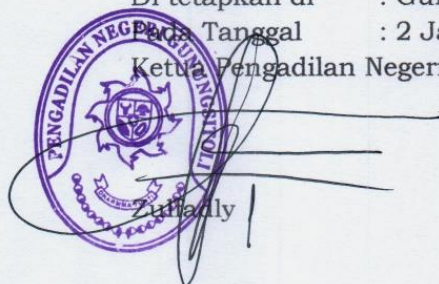
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI:

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli ;
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Tim Penyusun Laporan Tahunan adalah menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Di tetapkan di : Gunungsitoli

Tanggal : 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli,



The image shows the official seal of the Pengadilan Negeri Gunungsitoli, which is circular and contains the text 'PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI' around the perimeter. In the center of the seal is a smaller emblem. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Zuhadly'.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
Nomor : 2 /KPN/SK/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Zulfadly, S.H.,M.H. 197609062001121002	Ketua	Penanggungjawab
2	Dody Rahmanto, S.H.,M.H. NIP. 1978030320121004	Wakil Ketua	Ketua Tim
3	Leotua H.Tampubolon, S.H.,M.H. 197101071993031003	Panitera	Koordinator Pelaksana Kepaniteraan
4	Erwin Harefa, S.H. 197212211993031002	Sekretaris	Koordinator Pelaksana Keseekretariatan
5	Trisman Zandroto 196812291989031002	Panitera Muda Pidana	Anggota
6	Anuar Gea, S.H. 197307121993031001	Panitera Muda Perdata	Anggota
7	Ikuti Telaumbanua, S.H. 198403272011011010	Plt.Panitera Muda Pidana	Anggota
8	Berlianna Seniwati Laia, S.H. 198403312009042006	Kepala Subbagian Kepegawaian , Organisasi & Tatalaksana	Anggota
9	Wilpen F. Simanungkalit, S.Kom 198511092009121001	Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan	Anggota
10	Sahat Wira Josafat Simorangkir, S.E 199209222015031001	Penata Layanan Operasional	Operator
11	Deyendi Molore Manalu, S.Sos 199410072022031006	Penelaah Teknis Kebijakan	Operator

Di tetapkan di : Gunungsitoli
pada Tanggal : 2 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli,



Zulfadly